

SUARA RAKYAT DALAM PERSPEKTIF DIALEKTOLOGI

Oleh Dr. Andoyo Sastromiharjo, M.Pd. *)

Dialek sebagai sebuah varian bahasa yang digunakan komunitas tertentu (Francis, 1983:1) dapat memberikan cerminan perilaku berbahasa penggunanya. Suatu komunitas dapat melakukan berbagai tindak bertutur untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya. Dalam suatu konteks, sadar atau tidak sadar, para pengguna bahasa tengah memperlihatkan jatidiri (*identity*) mereka. Kejatidirian mereka tampak pada pemilihan bunyi atau pemilihan kata (*diction*), baik yang bersifat tunggal maupun ungkapan.

Dalam perspektif dialektologi, tindak bertutur mewakili kehadiran seseorang dalam komunitasnya. Tindak bertutur seseorang memiliki ciri-ciri yang bersifat umum dalam komunitasnya. Dengan kata lain, tindak bertutur seseorang menyuarakan pikiran dan perasaan komunitasnya. Rakyat sebagai komunitas yang sering dimarjinalkan menjadi bagian yang menarik untuk dikaji dari sisi tindak bertuturnya. Suara rakyat merupakan fenomena kebahasaan yang unik. Dengan berbagai dalihnya, suara rakyat merupakan kebenaran.

Dalam konsep kebahasaan, suara rakyat merupakan sebuah wacana. Fairclough (1995:97) mengatakan bahwa menganalisis wacana melibatkan tiga dimensi konsepsi kewacanaan, yaitu teks bahasa (*language text*), praktik wacana (*discourse practice*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*). Melalui kajian sosiolek, suara rakyat dapat dikaji dari tiga dimensi wacana tersebut. Dengan peranti tersebut terungkap pikiran dan perasaan rakyat dalam menghadapi fenomena kehidupan.

*) Dr. Andoyo Sastromiharjo, M.Pd. adalah dosen Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FPBS Universitas Pendidikan Indonesia

1. PENGANTAR

Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang tinggal di daerah tropik dengan beribu-ribu pulau, beragam budaya dan suku, serta beratus-ratus bahasa daerah. Kondisi demikian sangat menarik perhatian untuk diteliti dari berbagai aspek kehidupan, baik untuk bidang kajian politik, budaya, komunikasi, dan bahasa. Dengan kekayaan alam dan aset kehidupan yang ada bangsa Indonesia hidup dalam tatanan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan menganut demokrasi yang dijiwai Pancasila.

Situasi diglosis dan kedwibahasaan menjadi daya tarik para peneliti, baik dari bidang antropologi, sosiologi, etnografi, maupun linguistik. Selain itu, keragaman perkembangan dialek menuntut penelitian, baik penelitian untuk menemukan dialek baru maupun penelitian pengembangan terhadap persebaran dialek. Menurut Pusat Bahasa (dahulu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) di Indonesia terdapat tidak kurang dari 400 bahasa daerah dan *saSRapraja* (dialek) (lihat Ayatrohaedi, 1985:1). Kekayaan bahasa dan dialek seperti itu sudah sewajarnya Indonesia menjadi negara yang subur untuk penelitian bahasa.

Sebagai bangsa yang sedang menata demokrasi bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Setelah Orde Baru tidak dapat menyelesaikan persoalan di berbagai bidang kehidupan (ekonomi, sosial, dan politik), rakyat Indonesia menyuarkan reformasi dalam segala bidang. Pada tahun 1998 rakyat Indonesia memasuki era baru dalam kehidupannya. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di atasnamakan sebagai nafas demokrasi dan reformasi. Meskipun demikian, setiap pergantian pemimpin pemerintahan menimbulkan berbagai gejolak karena berbagai kebijakannya masih dirasakan belum menyuarkan keinginan rakyat yang ingin hidup adil dan makmur.

Suara-suara rakyat tersebut mencerminkan kehendak rakyat agar dapat hidup tenang, tentram, dan damai. Suara-suara tersebut dikemas dalam bahasa dialektis berupa yel-yel atau slogan-slogan yang ditujukan kepada pengambil kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Fenomena tersebut sangat menarik dari pandangan kebahasaan

karena yel-yel dan slogan-slogan tersebut dapat menandai keunikan bahasa dari sisi kewilayahan sosial tertentu.

Dalam makalah ini saya mencoba melihat suara-suara rakyat sebagai tuturan suatu komunitas yang dibangun melalui praktik berwacana. Secara sosiolinguistik, tuturan komunitas tersebut menunjukkan kekhasannya dalam hal pemilihan diksi dan konteksnya. Secara dialektologis, tuturan komunitas tersebut menunjukkan kewilayahan aspek sosial. Melalui suara rakyat ada pesan yang ingin disampaikan. Pesan-pesan tersebut tecermin melalui bentuk tuturan, baik berupa kata maupun frasa. Data analisis mengenai suara-suara rakyat tersebut saya peroleh dari praktik berwacana masyarakat melalui kegiatan unjuk rasa (*demonstration*).

2. Ragam Sosiolek Suara Rakyat

Ragam sosiolek (sosietal) merupakan salah satu ragam bahasa dilihat dari segi sosial. Ragam ini dapat dikaji dalam perspektif dialektologi sama halnya dengan ragam dialek regional. Pada salah satu situs dinyatakan “*A regional or social variety of a language distinguished by pronunciation, grammar, or vocabulary, especially a variety of speech differing from the standard literary language or speech pattern of the culture in which it exists* (<http://www.answers.com/topic/dialect?cat=technology> (10 Desember 2007). Richards, Platt, dan Weber (1985:262) menyatakan *sociolect (social dialect) is a variety of a language (a dialect) used by people belonging to a particular social class*. Pengertian tersebut menyiratkan bahwa sosiolek merupakan sebuah ragam yang digunakan oleh kelas sosial tertentu. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa sosiolek terkait dengan latar belakang sosioekonomi dan pendidikan. Untuk itu, dalam makalah ini saya sajikan analisis suara rakyat (SR) yang berkenaan dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan politik.

SR merupakan bentuk pernyataan pendapat yang wajar terjadi di era demokrasi. Dalam praktiknya, SR ditandai dengan berkumpulnya sekelompok orang yang menyuarakan pikiran dan perasaan mereka melalui orasi-orasi, yel-yel, dan pamflet-pamflet yang diusung sebagai perwujudan kehendak. Pamflet-pamflet yang mereka bawa berupa wacana-wacana yang menarik untuk dikaji, baik dari sisi dimensi

kewacanaan maupun struktur kewacanaannya. Dengan kata lain, dialektika SR dapat menjadi kajian menarik pada era demokrasi. Meskipun demikian, SR tidak selalu dalam kelompok. SR dapat disampaikan secara individual, seperti melalui puisi, lagu, atau bentuk pemajanan lainnya.

Sebagai bentuk pernyataan, SR cenderung menegaskan kondisi. Dari penegasian tersebut pelibat mengharapkan lembaga yang dituju dapat mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Secara verbal bentuk-bentuk SR beragam mulai dari penyanjungan (*act of giving praise*) sampai pada penghujatan (*act of blasphemy*). Bentuk SR penyanjungan biasanya terjadi pada saat pemilihan umum (*the general elections*) untuk menyukseskan salah satu partai. Bentuk SR penghujatan biasanya dilakukan melalui kegiatan unjuk rasa karena pelibat merasakan dimarginalkan dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu (pemerintah). Dengan demikian, SR sebagai sebuah wacana berfungsi ideologis dalam masyarakat (komunitas) untuk mendukung dan melegitimasi penggunaan kekuatan, dan menaturalisasikan ketidakadilan (*unjust*) hubungan sosial (<http://www-personal.umich.edu/~jaylemke/courses/SocCultSci/TextPolChap2.htm>).

Menganalisis SR berarti menelaah simbol-simbol sosial, baik secara verbal maupun nonverbal. Melalui simbol-simbol tersebut penganalisis berusaha memahami makna repertoar SR bukan hanya pada lapisan permukaan (*surface level*), tetapi juga pada lapisan dalam (*deep level*). Ketika kita sampai pada lapisan dalam, bahasa dapat mengungkap dimensi sosial penuturnya. Dengan demikian, bahasa tidak hanya sekadar untaian kata (*word string*), tetapi juga untaian peristiwa sosial. Benarlah apa yang dikatakan oleh Halliday bahwa bahasa merupakan semiotik sosial. Maksudnya, menafsirkan bahasa dalam konteks sosiokultural. Budaya ditafsirkan dalam istilah semiotik – sebagai sistem informasi. Basil Bernstein telah mendemonstrasikan bagaimana sistem semiotik budaya yang beragam mampu menentukan perbedaan kelompok sosial. William Labov telah mendemonstrasikan bagaimana variasi dalam sistem bahasa mengekspresikan keragaman dalam status dan peran sosial (<http://www-personal.umich.edu/~jaylemke/courses/SocCultSci/TextPolChap2.htm>). Berdasarkan

uraian tersebut tampak bahwa konteks memegang peranan penting untuk memahami bahasa (wacana) pada lapisan dalam.

3. Dimensi Kewacanaan SR

Fairclough (1995:97) mengatakan bahwa menganalisis wacana melibatkan tiga dimensi konsepsi kewacanaan, yaitu teks bahasa (*a language text*), praktik wacana (*discourse practice*), dan praktik sosiokultural (*sociocultural practice*). Fairclough melihat teks bukan hanya sebagai representasi bagaimana suatu objek ditampilkan, melainkan juga bagaimana hubungan antarobjek didefinisikan. Untuk itu menurut Fairclough menganalisis teks akan melibatkan tiga unsur, yakni representasi, relasi, dan identitas (Eriyanto,2001:289). Sementara Mills (1997:9) berpendapat bahwa wacana adalah representasi peristiwa di dalam teks. Lebih lanjut Mills menyatakan bahwa wacana bukan suatu sekumpulan pernyataan yang tak berwujud, melainkan sekelompok ujaran atau kalimat pernyataan-pernyataan yang berperan di dalam konteks sosial (Mills, 1997:11). Bahkan, konsep Laclau dan Mouffe terhadap wacana mencakup tidak hanya bahasa, tetapi juga semua fenomena sosial (Philips and Jorgensen, 2002: 33). Dengan demikian, suatu tulisan memberikan pandangan dialektis dari hubungan antara struktur dan aksi (Fairclough, 1995: 24).

Untuk memperoleh pemahaman terhadap dialektika SR berikut dikupas tiga unsur yang terlibat dalam wacana.

3.1 Teks SR

Teks bahasa (*a language text*) merupakan deskripsi (*description*) dari suatu wacana yang akan dianalisis. Sebagaimana dikatakan oleh Fairclough, sebuah teks melibatkan unsur representasi, relasi, dan identitas. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam bentuk verbal dan nonverbal SR. Untuk mengupas ketiga unsur tersebut, berikut ini uraiannya.

Teks SR dapat dianalisis berdasarkan representasi bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan dalam wacana. Jika kita cermati wacana-wacana SR ditampilkan oleh rakyat (pendemo) dengan beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut terkait dengan topik yang diusungnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awal makalah ini, dialektika SR yang dianalisis terkait dengan bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Ketiga topik tersebut merupakan faktor-faktor sosial yang dekat dengan kehidupan. Untuk itu beberapa contoh SR di bawah ini dapat memberikan gambaran yang jelas.

(1) GERAKAN SISWA BERSATU

TOLAK UJIAN NASIONAL

PENENTU KELULUSAN (*Pikiran Rakyat*, 15 September 2007)

(2) Pendidikan Islam Yes! Pendidikan Sekuler No! (*Tempo*, 10 Juni 2003)

(3) PENDIDIKAN ISLAM RAHMAT UNTUK SEMUA (*Tempo*, 10 Juni 2003)

(4) STOP SECULARISTIC EDUCATION (*Tempo*, 10 Juni 2003)

(5) KAMPUS UI FK 120 jt

FISIP: 40 – 60 jt

FIB 25 jt

FT - 75 jt

FH 25 jt

BANTING HARGA JAM 06.00!!

(6) W000 ... !!!

PENDIDIKAN MURAH UNTUK RAKYAT (*Pikiran Rakyat*, 26 Juni 2003)

(7) TOLAK KOMERSIALISASI ITB (*Republika*, 25 Juni 2003)

(8) KAMI MELAWAN ITU TANDA KAMI TAK MAKAN (*Kompas*, 23 Mei 2003)

(9) BURUH BUKANLAH ALAT PRODUKSI SEMATA (*Kompas*, 26 Juni 2003)

(10) GO TO HELL IMF (*Republika*, 19 Mei 2003)

(11) IMF BIANG KEROK CRISIS (*Forum Keadilan* No. 10, 23 Juni 2003)

(12) CARIK KUDU PILIHAN RAKYAT (*Surya*, 13 Mei 2003)

SR (1) menunjukkan keinginan pelibat (Gerakan Siswa Bersatu) agar para siswa menolak Ujian Negara sebagai penentu kelulusan. Ujian Negera (UN) merupakan jargon dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, UN dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa menempuh suatu jenjang

pendidikan. Ada tiga mata uji untuk UN, yaitu (1) Bahasa Indonesia, (2) Matematika, dan (3) Bahasa Inggris. Jika para siswa telah mencapai nilai di atas batas lulus, siswa tersebut dinyatakan lulus. Kebijakan tersebut dirasakan oleh siswa sebagai kebijakan yang terlalu berat. Namun, di balik keinginan tersebut muncul makna bahwa mereka (para siswa) tidak menolak kehadiran UN. UN boleh diselenggarakan, tetapi tidak sebagai penentu kelulusan.

SR (2), (3), dan (4) terkait dengan pendidikan yang berbasis Islam. Dari bentuk verbal SR tersebut tersirat keinginan pelibat agar pemerintah memperhatikan pendidikan yang berbasis agama. Mereka mensinyalir bahwa pendidikan yang diselenggarakan negara Barat “berbau” sekuler. Jika sekulerisme merambah kehidupan bangsa Indonesia, dikhawatirkan terjadi pengikisan nilai-nilai agama. Seandainya nilai-nilai agama tidak lagi menjadi acuan, bangsa Indonesia akan kehilangan pedoman hidup.

SR (5) dan (6) berisi daftar Maya untuk memasuki berbagai fakultas yang ada di Universitas Indonesia (UI). Meskipun menggunakan angka, kekuatan SR (5) berada pada kata-kata yang mengiringinya. Pernyataan "BANTING HARGA JAM 06.00" menunjukkan bahwa pendidikan tinggi seolah-olah sudah menjadi komoditas sehingga orientasinya bukan lagi pada kualitas intelektual melainkan pada segi komersial. Dengan demikian, produk yang dihasilkan bukan pada profesionalisme lulusan, melainkan pada keuntungan (secara ekonomi) perguruan tinggi. Jika hal ini terjadi, bangsa Indonesia tidak akan memiliki SDM yang tangguh. Selain itu, pemahaman terhadap pernyataan "Woo...!! "PENDIDIKAN MURAH UNTUK RAKYAT" pada SR (6) harus dilakukan dengan menggunakan pemahaman kebalikan (meminjam istilah Eggy Sujana dalam Suparno, 2000:4). Dengan demikian, masyarakat yang berharap agar biaya pendidikan semurah mungkin (bila perlu dibebaskan) masih jauh untuk bisa diwujudkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, tetapi biaya pendidikan berjuta-juta. Biaya tersebut sulit untuk bisa dipenuhi oleh sebagian besar masyarakat.

SR (7) masih berada pada wilayah pendidikan. Pada SR (7) tampak pelibat tidak berkeinginan ITB (salah satu perguruan tinggi terkenal di Indonesia) menjadi perguruan

tinggi yang lebih mengedepankan komersial daripada kualitas pendidikan. Kata KOMERSIALISASI berada pada wilayah ekonomi. Dengan kata lain, sebuah perguruan tinggi seharusnya lebih memperhatikan kualitas daripada bisnis. Bentuk komersialisasi yang dimaksud adalah model seleksi masuk mahasiswa baru melalui jalur nonreguler dengan membayar sejumlah uang agar dapat menjadi mahasiswa di ITB. Model seleksi masuk tersebut terkesan bernuansa ekonomi sehingga yang diperhitungkan bukan segi kualitas, melainkan segi keuntungan secara material.

SR (8) menunjukkan efek sosial dari sebuah perlawanan. Kata MELAWAN dimaksudkan melakukan kegiatan penolakan terhadap suatu kebijakan atau suatu kondisi. Pada saat rakyat melakukan perlawanan berarti ruang gerak ekonomi tertutup. Kondisi demikian berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan hidup (tidak makan). Dengan demikian, pelibat pada SR (8) memajukan (*to expose*) jargon MELAWAN dan TIDAK MAKAN.

SR (9) menunjukkan keinginan buruh (dan simpatisan buruh) agar jangan dirinya menjadi *alai produksi* semata. Jika buruh dipandang sebagai *alat produksi*, berarti buruh tidak boleh bersuara dan para pemilik perusahaan tidak harus mengetahui bagaimana kondisi fisik dan Kesejahteraannya. Seandainya kondisi seperti ini terjadi, harkat manusia telah jatuh.

Yang menarik dari SR (10) ini adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai media SR. Melalui bahasa Inggris, para pendemo berkeinginan agar apa yang dikehendaki dapat menjadi konsumsi masyarakat bukan hanya masyarakat Indonesia, melainkan juga masyarakat internasional karena bahasa Inggris sebagai bahasa dunia. Dengan demikian, secara praktik wacana masyarakat internasional perlu tahu bahwa masyarakat Indonesia tidak berharap IMF berperan untuk mengembalikan perekonomian Indonesia pada posisi aman. Penghujatan terhadap organisasi dunia tersebut terlihat jelas pada kata “HELL” (Neraka). Jargon tersebut digunakan penutur bahasa untuk menunjukkan suatu tempat yang mengerikan (*horrificed*), menyeramkan (*terrify*), mengenaskan (*deeply saddened*). Neraka merupakan tempat berakhirnya kehidupan orang-orang yang telah melanggar peraturan

Tuhan. Jargon tersebut memiliki kekuatan makna di samping menunjukkan kejengkelan (*annoy*).

SR (11) menyematkan ungkapan bahasa Betawi (dialek Jakarta) "BIANG KEROK". Ungkapan ini memiliki makna yang sangat dalam dan bernilai negatif. Dengan penyebutan tersebut, IMF dituduh sebagai sumber kesengsaraan bangsa Indonesia. Di samping dialek Jakarta, bentuk SR juga menyematkan bahasa daerah (bahasa Jawa), yakni kata "kudu" pada SR (12). Kata "kudu" berarti 'harus'. Dengan kata ini pelibat berharap agar Carik "tidak boleh tidak" merupakan pilihan rakyat. Dengan demikian, melalui pelibat berupaya untuk menggagalkan sistem pemilihan yang tidak demokratis (terjadi KKN atau pesanan dari pemerintah).

3.2 Praktik Wacana SR

Praktik wacana (*discourse practice*) berkaitan dengan interpretasi hubungan antara produksi teks dan interpretasi proses diskursif dan wacana. Dari praktik wacana ini dapat dilihat proses pelibat SR memproduksi teks dan makna yang ada di balik produksi teks tersebut. Sebagai sebuah wacana, SR mencerminkan cara berpikir dan berperilaku pelibat dalam menghadapi topik yang diusung.

Wacana SR yang diusung pelibat tidak semata-mata dihasilkan dengan menuliskan kata-kata begitu saja, tetapi diproduksi melalui proses yang kompleks. Kekompleksan dalam pemroduksian wacana SR ini melibatkan bukan hanya sosok individu pembuat wacana, melainkan juga faktor topik, tujuan, sasaran yang dituju, dan kondisi masyarakat pada saat wacana dibuat. Oleh sebab itu, setiap wacana SR memiliki kekhasan (*unique*).

Wacana SR (7) berbunyi "TOLAK KOMERSIALISASI ITB" (KM ITB). Wacana ini dibuat oleh Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (sebagaimana yang tercantum pada akhir wacana). Pemilihan kata "KOMERSIALISASI" pada wacana tersebut menjadi ciri bahwa wacana tersebut diproduksi oleh pihak yang berpendidikan tinggi. Pelahiran kata ini dilatari oleh munculnya program "Jalur Khusus" di ITB yang disediakan untuk calon mahasiswa yang bersedia memberikan dana pendidikan yang "tinggi" (Rp 45 – 150 juta). Dengan dibukanya jalur khusus ini berarti ITB, yang saat ini

telah menjadi BHMN, dipersepsi melakukan komersialisasi dalam dunia pendidikan tinggi. Terlepas dari benar-tidaknya persepsi ini, para mahasiswa yang tergabung dalam KM ITB tidak setuju dengan upaya ITB menggalang dana pendidikan agar kualitas lulusan siap menghadapi era kompetisi dalam dunia kerja. Sikap menolak ini perlu mendapat dukungan sivitas akademika ITB sehingga upaya membuka “Jalur Khusus” tersebut dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Pelahiran wacana SR seperti itu dilatari konsumsi wacana adalah sivitas akademika perguruan tinggi sehingga diksi yang muncul tidak vulgar. Artinya, pembuat wacana SR tersebut masih bisa mengendalikan emosinya atau masih berada pada kendali pikir (*mind control*).

Jakarta merupakan ibukota negara. Dengan status tersebut dialek Jakarta menjadi bahan rujukan untuk pembuatan SR (11). Kata BIANJ KEROK merujuk pada orang yang menjadi penyebab terjadinya suatu keriuhan (*chaos*) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001:146). Kata tersebut digunakan untuk menggambarkan kekesalan (*annoyance*). Begitu pula SR (12) yang mengandung diksi dari bahasa Jawa. Kata kudu menyiratkan suatu pemaksaan. Kata tersebut digunakan untuk menunjukkan kepada pemerintah setempat bahwa di dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga dalam pemilihan kepala daerah, pemerintahan tidak perlu turut campur dalam pemilihannya. Kekesalan itu timbul disinyalir adanya “pengiriman” calon.

3.3 Praktik Sosiokultural SR

Praktik sosiokultural (*sociocultural practice*) berhubungan dengan penjelasan (*explanation*) dari hubungan antara proses diskursif dan proses sosial. Dengan memanfaatkan teks dan praktik wacana dapat dilihat makna SR di balik kedua dimensi tersebut secara sosiokultural. Praktik sosiokultural ini menggambarkan bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat menyebarkan ideologi yang dominan kepada masyarakat. Dengan kata lain, sebuah wacana berfungsi idealogis dalam masyarakat (komunitas) untuk mendukung dan melegitimasi penggunaan kekuatan, dan menaturalisasikan ketidakadilan (*unjust*) hubungan sosial (<http://www-personal.umich.edu/~jaylemke/courses/SocCultSci/TextPolChap2.htm>).

Wacana SR yang telah dibahas di atas menunjukkan praktik sosiokultural yang jelas. Melalui latar situasi yang muncul, kelembagaan (unsur pelibat) yang melakukan, dan faktor sosial dapat dipahami bagaimana praktik sosiokulturalnya. Dalam kehidupan sosial rakyat memiliki posisi kuat untuk menyuarakan pikiran dan perasaannya. Kekuatan tersebut dipergunakan untuk mengontrol berbagai kebijakan pemerintah dan atau perilaku masyarakat. Dengan kekuatan tersebut seolah-olah rakyat memiliki “legitimasi” untuk melakukan sesuatu.

SR (4) berbunyi “STOP SECULARISTIC EDUCATION”. Wacana bernuansa pendidikan tersebut memiliki praktik sosiokultural yang menarik. Selama ini agama menjadi bagian dalam melaksanakan sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Bab III Pasal 4 ayat 1). Melalui pendidikan agama bangsa Indonesia disiapkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Namun, dalam perjalanan bangsa, berbagai corak pendidikan dari luar masuk yang dalam pelaksanaannya dapat mengikis nilai-nilai luhur agama. Oleh sebab itu, sebagai bangsa yang beragama, masyarakat bangkit melalui suaranya untuk menghentikan praktik pendidikan sekuler karena model pendidikan seperti itu dapat mengaburkan dan bisa menghilangkan pranata masyarakat yang sudah terbina.

SR (9) berbunyi “BURUH BUKANLAH ALAT PRODUKSI SEMATA”. Berdasarkan kajian dimensi wacana dan praktik wacana, praktik sosiokulturalnya tampak bahwa dalam sistem industri buruh merupakan “alat produksi”. Cara pandang demikian telah merendahkan derajat kemanusiaan. Hubungan majikan dan buruh dalam sistem industri seharusnya bersifat kemitraan. Dengan demikian, buruh tidak dipandang sebagai alat produksi, tetapi dipandang sebagai mitra untuk meningkatkan kinerja. Jika

cara pandang tersebut tidak diubah, buruh hanya dipandang “sebelah mata”. Tenaganya dikuras habis, tetapi kesejahteraannya kurang mendapat perhatian. Dengan kata lain, paradigma humanistis harus ditumbuhkan.

SR (12) berbunyi “CARIK KUDU PILIHAN RAKYAT”. Praktik sosiokultural yang tergambar dari wacana SR (12) tersebut berada pada wilayah politik. Sebelum era reformasi sistem politik di Indonesia dibangun melalui kekuatan Orde Baru. Pada masa itu pejabat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah “diatur” untuk mengokohkan kedaulatan. Ternyata, pengaturan seperti itu menghambat lajunya demokratisasi. Ungkapan SR (12) menyiratkan bahwa rakyatlah yang harus menentukan pilihan kepada siapa pemerintahan di tingkat desa harus ditentukan. Carik merupakan salah satu pejabat pemerintahan di tingkat desa. Dia dipilih oleh rakyat untuk mengatur wilayahnya. Untuk itu, segala praktik yang dapat mengotori demokrasi harus disisihkan. Kata “kudu” dalam bahasa Jawa menguatkan kehendak sosiokultural bahwa kehendak rakyat tidak bisa diabaikan.

4. KESIMPULAN

Suara rakyat merupakan media komunikasi antara pihak yang merasa dikenai perlakuan dengan pihak yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan kata lain, suara rakyat merupakan salah satu perwujudan sikap masyarakat terhadap fenomena yang terjadi. Komunikasi yang dijalin dapat berbentuk komunikasi verbal (lisan atau tulis) dan komunikasi nonverbal.

Dalam perspektif dialektologi sosiolek berupa SR patut untuk mendapat perhatian. Melalui kajian dimensi kewacanaan, praktik wacana dan praktik sosiokultural mampu memberikan pencerahan bahwa bahasa sangat berperan dalam kehidupan karena bahasa memiliki kekuatan untuk mengubah berbagai kebijakan. Dengan bahasa masyarakat dapat menyuarakan nuraninya. Suara nurani adalah suara kebenaran. Suara nurani adalah suara kewilayahan individu sehingga SR menjadi kajian menarik untuk menelaah substansi kewilayahan kelompok sosial. Di samping memiliki jargon-jargon sosial, SR memiliki keragaman nada bahasa (mulai dari yang halus, ironi, sampai pada sarkasme). Nada-nada bahasa ini mencerminkan bahasa nurani kelompok sosial tertentu.

Keragaman jargon dan nada bahasa menunjukkan kekayaan suatu bahasa dalam perspektif dialektologi.

Dari praktik wacana dan praktik sosiokultural, ragam bahasa SR menunjukkan kedekatan proses diskursif dan proses sosial sehingga pemajanan SR dapat ditelusuri makna hakikinya. Ragam bahasa SR tidak hanya menyajikan makna secara linguistik, tetapi juga makna secara pragmatis karena konteks linguistik dan sosial secara bersama-sama membangun sinergi makna hakiki.

Sumber Rujukan

- Ayatrohaedi. 1978. *Bahasa Sunda di Daerah Cirebon*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fairclough, N. 1995. *Critical Discourse: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Fairclough, N. 2003 *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi*. Terjemahan Indah Rohmani. Malang: Boyan.
- Francis, W.N. 1983. *Dialectology: An Introduction*. New York: Longman.
- Gee, J.P. 1999. *Discourse Analysis: Theory and Method*. New York: Routledge.
- Halliday, M.A.K. 1978. *Language as Social Semiotic*. Tersedia pada <http://english.ttu.edu/kairos/3.1/reviews/eiler/social.html> diunduh pada 10 Desember 2007
- <http://www.answers.com/topic/dialect?cat=technology> (10 Desember 2007)
- Lemke. Tanpa tahun. *Discourse and Social Theory*. Tersedia pada <http://www-personal.umich.edu/~jaylemke/courses/SocCultSci/TextPolChap2.htm>. diunduh pada 10 Desember 2007.
- Mills, S. 1997. *Discourse*. New York: Routledge.

Philips, L. and Jorgensen, M.W. 2002. *Discourse Analysis as Theory and Method*.
London: Sage Publications Inc.

Richards, J; Platt, J.; Weber, H. 1985. *Longman Dictionary Applied Linguistics*.
Hongkong: Longman.

Sastromiharjo, A. 2004. "Dialektika Bahasa Demo". *Jurnal Bahasa dan Sastra*. FPBS
Universitas Pendidikan Indonesia Vol. 4, No. 7 Oktober 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Sisdiknas). Bandung: Citra Umbara.

Surat Kabar:

Forum Keadilan No. 10, 23 Juni 2003

Kompas, 23 Mei 2003

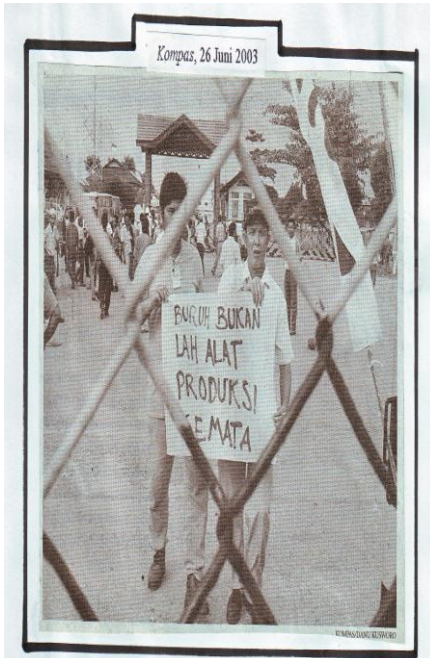
Pikiran Rakyat, 26 Juni 2003

Republika, 19 Mei 2003

Republika, 25 Juni 2003

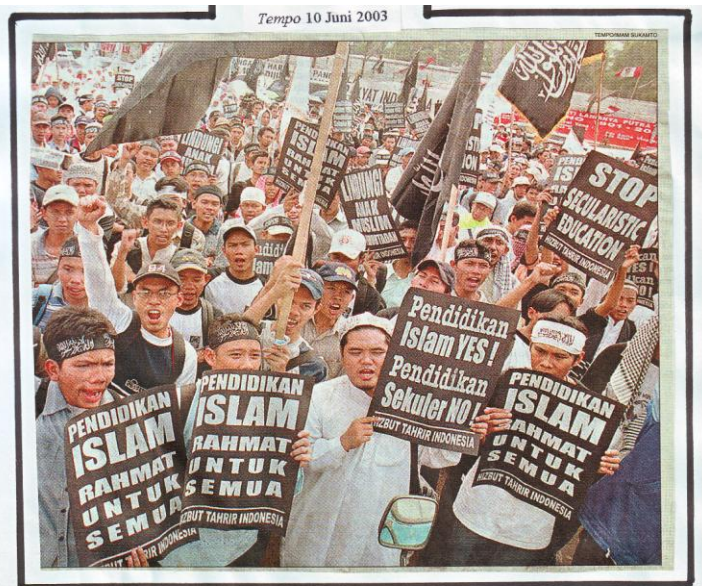
Surya, 13 Mei 2003

Lampiran



Pelajar Tolak UN

PARA pelajar yang tergabung dalam GSB (Gerakan Siswa Bersatu) Jakarta sambil membawa berbagai spanduk dan poster berjalan menuju pelataran Gedung Sate saat melakukan aksinya, Jumat (9/6). Aksi sejumlah pelajar ini mendesak kepada pihak DPRD Jakarta untuk menuntut dikaji ulang kebijakan tentang pelaksanaan ujian nasional (UN).*





Forum Keadilan No. 10, 23 Juni 2003



MEMPERINGATI HARI BURUH SEDUNIA. Dampak IMF paling krusial.